

FAKTOR-AKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Oleh :

Rada Ratna Sari^{1*}

Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia

radaratnasari21@gmail.com

Annie Mustika Putri²

Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia

Zul Azmi³

Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia

Co Author *radaratnasari21@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 20 Feb 2022

Direview : 05 April 2022

Disetujui : 01 Juni 2022

ABSTRACT

This study aims to provide evidence regarding Village Fund Management. In particular, this study examines the effect of apparatus competence, community participation, internal control and organizational commitment on village fund management accountability. This research is an empirical study using quantitative methods based on secondary data. The sample selection of this study used a purposive sampling method with a total of 127 questionnaires distributed in Kapur IX District. The test of this study used SPSS Version 20. It was used in data analysis and hypothesis testing. The results of this study found that the competence of the apparatus, community participation, internal control, and organizational commitment have an effect on the accountability of village fund management.

Keywords : Apparatus Competence, Community Participation, Internal Control, Organizational Commitment, Accountability

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti mengenai mengenai Pengelolaan Dana Desa. Secara khusus, penelitian ini menguji pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.. Penelitian ini merupakan penelitian empirik dengan menggunakan metode kuantitatif yang berbasis pada data sekunder. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah 127 kuisisioner yang disebar yang ada di Kecamatan Kapur IX.. Pengujian penelitian ini menggunakan SPSS Versi 20. digunakan dalam analisis data dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, pengendalian internal, dan komitmen organisasi.berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Kata Kunci : Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui 3 alur, yang pertama peningkatan pelayanan publik, kedua peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir peningkatan daya saing daerah. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah memutuskan bahwa desa ialah kesatuan warga hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan rakyat setempat berdasarkan dari usul serta norma istiadat setempat yang diakui pada sistem pemerintahan nasional dan berada pada wilayah kabupaten. Semua proses pengelolaan Dana Desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Dalam pengelolaan Dana Desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas (Makalalag, *et al.*, 2017).

pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa adalah suatu cara atau proses mengatur keuangan

dana desa yang diberikan pemerintah dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan, penilaian dan pelaporan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama (Masruhin dan kaukab, 2019).

Dikutip dari bebas.com Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Dana Desa dengan nilai yang besar untuk sebuah program/kebijakanyang baru. Pada tahun 2020, Alokasi Dana desa mencapai Rp 72 Triliun untuk sekitar 74.950 desa diindonesia. Alokasi dana desa terus meningkat dari Rp 20,8 Triliun tahun 2015 menjadi Rp 69,8 Triliun ditahun 2019. Pada 2019, rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi Rp 933,9 juta. Menurut data dari wesite www.djpk.kemenkau.go.id Sumatra Barat Anggaran Pendapatan Dana Desa tahun 2019 mencapai sejumlah Rp 889.090.968.000. Sedangkan di tahun 2020 mencapai Rp1.011.135.402.000, dari data tersebut anggaran pendapatan Dana Desa tahun 2019 ke 2020 mengalami peningakatan sejumlah Rp 122.044.434.000. Dan untuk anggaran Dana Desa di Kabupaten Lima Puluh kota pada tahun 2019 senilai Rp 75.446.605.000, dan untuk tahun 2020 senilai Rp 78.429.451.000.

Tabel 1. Anggaran Dana Desa di Kecamatan Kapur IX Tahun 2019-2020

Nama desa	Anggaran Dana Desa 2019	Anggaran Dana Desa 2020
Koto Tuo	907.659.379	914.122.000
Lubuak Alai	933.265.661	899.811.000
Muaro Paiti	956.765.719	974.702.000
Koto bangun	963.560.344	1.002.037.000
Durian Tinggi	885.383.138	876.921.000
Sialang	1.295.685.000	1.357.976.000
Galugua	1.459.859.275	1.502.061.000

Sumber: Laporan Anggaran Pendapatan Nagari Tahun 2019 – 2020

Berdasarkan tabel diatas anggaran pendapatan Dana Desa Kecamatan Kapur IX tahun 2019 ke 2020 secara signifikan sudah mengalami peningkatan. Dari 7 desa di kecamatan Kapur IX hanya 2 desa yang anggaran pendapatan dana desa dari 2019 ke 2020 mengalami penurunan, yaitu desa lubuak alai dan desa Durian Tinggi. Maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada desa se Kecamatan Kapur IX. Di desa Durian Tinggi pada tahun 2019 Dana Desa tidak terealisasi dengan baik, seperti kurangnya pembangunan nagari dari Dana Anggaran tahun 2019. Contohnya dalam anggaran

tahunan Dana Desa 2019 dilaporkan adanya Pembangunan, Rehabilitas, Peningkatan dan pengerasan jalan. Namun dilihat pada kenyataannya realiasi Pembangunan, Rehabilitas, Peningkatan dan pengerasan jalan tidak berjalan dengan semestinya. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi kasus dituntut turunnya dari jabatan beberapa Staf perangkat desa dikarenakan masyarakat mulai merasa pengelolaan Dana Desa yang kurang maksimal dan tidak sesuai dengan laporan tahunan Dana Desa. Hal ini diperkirakan kurangnya kompetensi aparatur pengelola dana desa dalam

memahami pengelolaan dana desa, aparatur sebagian banyak hanya lulusan SMA, dan partisipasi masyarakatnya dalam pengelolaan Dana Desa yang ada.

Berdasarkan dari kasus diatas dampak yang dapat dilihat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, sehingga dibutuhkan adanya kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, pengendalian internal dan komitmen organisasi. Penelitian Aulia (2018) menyatakan bahwa semakin baik kompetensi aparat pengelola Dana Desa maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaannya. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Gayatri (2019), Mada, *et al.*, (2017). Faktor kedua Partisipasi Masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan Aulia (2018) menyatakan bahwa peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan dapat meningkatkan kinerja pemerintah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Semakin baik partisipasi masyarakat, maka pengelolaan Dana Desa semakin Akuntabel. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Gayatri (2019), dan Mada, *et al.*, (2017). Dalam Widyatama, *et al.*, (2017) Faktor pendukung akuntabilitas adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan publik. Dan faktor yang ke empat adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan salah satu faktor yang harus dimiliki seseorang dalam organisasi untuk mewujudkan akuntabilitas (Mada, *et al.*, 2017).

Dalam penelitian ini perumusan masalahnya apakah masing-masing variabel seperti kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ada pada desa yang diteliti yaitu 7 desa yang ada dikecamatan kapor IX. Dalam penelitian (Atiningsih dan Ningtyas, 2019) menyebutkan bahwa kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Semakin besar kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pengendalian internalnya maka akuntabilitas pengelolaan Dana Desa akan semakin baik. Berbeda dengan penelitian (Widyatama, *et al.*, 2017) menyebutkan bahwa kompetensi aparatur secara signifikan tidak memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa.

KAJIAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Menurut Donaldson & Davis (1991), *Stewardship Theory* adalah teori yang menggambarkan situasi para manajer yang tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang para eksekutif dalam perusahaan atau organisasi sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai keinginan pemerintah pusat dan masyarakat. *Stewardship Theory* mengasumsikan bahwa adanya hubungan kuat antara kesuksesan organisasi dan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *Stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti *steward* tidak mempunyai kebutuhan hidup (Raharjo, 2007).

Pada *Stewardship Theory* ini didasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi dari pada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Pada *Stewardship Theory* terdapat suatu pilihan antara *self serving* dan *pro organisational*, perilaku pelayanan tidak dipisahkan dari kepentingan organisasi adalah bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan principal dimana para *steward* akan menggantikan atau mengalihkan *self serving* untuk perilaku kooperatif. Sehingga meskipun kepentingan antara *steward* dan *principal* tidak sama, *steward* tetap akan menjunjung tinggi kebersamaan. Sebab *steward* berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif, dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional yang diterima (Anton, 2010).

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Yesinia *et al.*, 2018). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang

berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Mada, *et al.*, (2017) mengatakan bahwa sebagai pengelola sumber daya maka, masyarakat membutuhkan informasi yang terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh pengelola tersebut yakni pemerintah. Informasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna mengetahui seberapa besar sumber daya yang dimiliki serta mengalokasikan sumber daya tersebut.

Menurut Soleh dan Rocmansjah (2015:35) mengatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan keuangan desa (APBDes) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan Permendagri 133 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa

Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten, yang berarti cakap, mampu, atau terampil. Pada konteks manajemen Sumber Daya Manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut/karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya (Wiyatama, *et al.*, 2017).

Dalam Rudana (2005) menyebutkan bahwa kompetensi merujuk kepada pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skills*) dan kemampuan (*abilities*), yang dapat didemonstrasikan, yang dilakukan dengan standar tertentu. Kompetensi dapat diobservasi, merupakan tindakan perilaku yang memerlukan kombinasi dari ketiga hal ini. Kompetensi ini ditunjukkan dalam konteks pekerjaan dan dipengaruhi oleh budaya organisasi dan lingkungan kerja. Dengan kata lain, kompetensi meliputi kombinasi dari pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau fungsi didalam setting pekerjaan.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa (BPKPN, 2016). Partisipasi juga diartikan juga bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung

maupun melalui intermediasi institusi legetimasi yang mewakili kepentingan (Sarah, *et al.*, 2020).

Partisipasi merupakan segala aspek kehidupan baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena jarak yang lebih dekat antara pemerintah dan warga masyarakat dapat membuat pejabat publik dan pemerintah lebih bertanggung jawab (Mada, *et al.*, 2017).

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan menurut (PP Nomor 60 tahun 2018). Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undangan". Sedangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Atiningsih dan Ningtyas, 2019)

Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

Komitmen organisasi merupakan tingkatan seseorang untuk meyakini dan menerima tujuan organisasi, serta berkeinginan untuk menatap bersama organisasi tersebut, orang yang merasa puas dengan pekerjaan yang diembannya maka akan sedikit lebih tinggi komitmen terhadap organisasi atau lembaga (Tarjo, 2019).

Komitmen organisasi merupakan salah satu faktor yang harus dimiliki seseorang dalam organisasi untuk mewujudkan akuntabilitas (Mada, *et al.*, 2017). Komitmen organisasi yang baik dari seseorang dalam suatu organisasi dapat memberikan manfaat terhadap sistem akuntabilitas (Aulia, 2018).

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Perangkat desa dengan kompetensi yang memadai akan mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa sebagai *steward* harus mampu patuh terhadap aturan terkait pengelolaan Dana Desa, terlebih jumlah Dana Desa yang diterima desa selalu meningkat setiap tahun dan diawasi secara ketat oleh pemerintah pusat. Pengelolaan Dana desa masih memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya dari faktor sumber daya manusia (Dewi dan Gayatri, 2019).

Teori ini sejalan dengan teori *Stewardship*, aparatur yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas. Sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam penggunaan Dana Desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang diharapkan. Penelitian Mada, *et al.*, (2017), menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang berarti bahwa semakin kompeten aparat pengelola Dana Desa maka pengelolaan Dana Desa semakin akuntabel. Didukung Dewi dan Gayatri (2019) yang menyatakan bahwa semakin banyak aparatur desa yang memiliki kompetensi didalam bidangnya maka semakin tinggi tingkat kepercayaan pemerintah serta masyarakat terhadap pengalokasian dana desa. Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H1: Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Partisipasi masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa membutuhkan partisipasi masyarakat, sebab prioritas penggunaan Dana Desa salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat hanya mampu tercapai apabila masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa. Hal ini sejalan dengan Teori *Stewardship*, bentuk akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa dengan memberikan pertanggungjawaban segala aktivitas kepada pihak masyarakat akan menimbulkan *Responsiveness* kepada masyarakat. Responsif ini dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan dari masyarakat untuk menilai kegiatan maupun kinerja dari pemerintah dalam hal

kesesuaian dengan harapan atau permintaan masyarakat.

Penelitian Dewi dan Gayatri (2019), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan mengingat sensitivitas pengelolaan Dana Desa yang rentan terhadap penyelewengan. Keberhasilan penyelenggaraan pengelolaan Dana desa tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat desa sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan. Sejalan dengan penelitian Mada *et al.*, (2017) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H2: Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem pengendalian internal diperlukan organisasi untuk menjamin bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Sistem pengendalian internal yang diimplementasikan oleh pimpinan dan seluruh pegawai akan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, melindungi aset organisasi, serta menjamin bahwa peraturan yang berlaku dilaksanakan dengan baik (Yesinia *et al.*, 2018). Hal ini sejalan dengan Teori *Stewardship*, dimana dengan adanya pengendalian internal yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang baik, maksimal, efektif dan efisien untuk disajikan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Sistem pengendalian internal yang memadai akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyusunan, hukum dan peraturan dalam pembuatan laporan keuangan sehingga laporan yang akan dihasilkan lebih akuntabel. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Widyatama, Arif (2017) dimana pengendalian internal berpengaruh dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H3: Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Komitmen Organisasi adalah suatu fenomena yang berhubungan perilaku kewarganegaraan, prestasi dan produktivitas. Adanya komitmen organisasi diharapkan dapat

mendukung pengelolaan Dana Desa sehingga mampu melaksanakan program kegiatan dengan baik. Hal ini sejalan dengan Teori *Stewardship*, aparatur pengelola Dana Desa harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kewajiban sebuah organisasi atau institusi adalah memberikan pertanggungjawaban dari segala aktivitas dalam mengelola anggaran yang secara langsung pertanggungjawaban tersebut dilakukan oleh aparatur sebagai penggerak organisasi. Prinsip komitmen juga ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Mada *et al.*, (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara komitmen organisasi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin kuat komitmen aparatur desa terhadap organisasinya maka tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas dana desa akan semakin baik. Dan dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H4: Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. data primer diperoleh dengan menyebar kuesioner. Populasi merupakan perangkat desa yang ada dikecamatan kapur IX. Teknik sampel dalam penelitian ini adalah *Non Probability Sampling*. Berdasarkan sampel yang akan diambil, kriteria dalam pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perangkat desa yang terdiri dari Kepala desa, Sekretaris desa, Kepala urusan keuangan, Kepala urusan umum, Kasi perencanaan, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan dan pelayanan, Operator Komputer, RT, dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
2. Memiliki masa jabatan minimal 1 tahun dan tingkat pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat.

Sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa di 7 desa yang ada di Kecamatan Kapur IX yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum, Kasi Perencanaan, Kasi Pemerintahan, kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Operator Komputer, RT, dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Jumlah responden untuk penelitian ini terdiri dari 127 responden untuk 7 desa yang ada di Kecamatan Kapur IX.

Tabel 2. Populasi dan Sampel Penelitian

No	Nama Desa	Jabatan	Jumlah
1	Koto Lamo	1. Kepala Desa	1
		2. Sekretaris Desa	1
		3. Kaur Keuangan	2
		4. Kaur Umum dan Perencanaan	1
		5. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	1
		6. Kasi Pemerintahan	1
		7. Operator Komputer	1
		8. BPD	5
		9. RT	4
2	Lubuk Alai	1. Kepala Desa	1
		2. Sekretaris Desa	1
		3. Kaur Keuangan	1
		4. Kaur Umum dan Perencanaan	2
		5. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	2
		6. Kasi Pemerintahan	1
		7. Operator Komputer	1
		8. BPD	4
		9. RT	4
3	Muaro Paiti	1. Kepala Desa	1
		2. Sekretaris Desa	1
		3. Kaur Keuangan	1
		4. Kaur Umum dan Perencanaan	1
		5. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	1

		6. Kasi Pemerintahan	1
		7. Operator Komputer	1
		8. BPD	6
		9. RT	6
4	Koto Bangun	1. Kepala Desa	1
		2. Sekretaris Desa	1
		3. Kaur Keuangan	2
		4. Kaur Umum dan Perencanaan	2
		5. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	2
		6. Kasi Pemerintahan	1
		7. Operator Komputer	1
		8. BPD	6
		9. RT	3
5	Durian Tinggi	1. Kepala Desa	1
		2. Sekretaris Desa	1
		3. Kaur Keuangan	1
		4. Kaur Umum dan Perencanaan	1
		5. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	1
		6. Kasi Pemerintahan	1
		7. Operator Komputer	1
		8. BPD	6
		9. RT	3
6	Sialang	1. Kepala Desa	1
		2. Sekretaris Desa	1
		3. Kaur Keuangan	2
		4. Kaur Umum dan Perencanaan	2
		5. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	3
		6. Kasi Pemerintahan	1
		7. Operator Komputer	1
		8. BPD	7
		9. RT	4
7	Galugua	1. Kepala Desa	1
		2. Sekretaris Desa	1
		3. Kaur Keuangan	1
		4. Kaur Umum dan Perencanaan	2
		5. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	1
		6. Kasi Pemerintahan	1
		7. Operator Komputer	1
		8. BPD	4
		9. RT	5
	Total		127

Sumber: Struktur organisasi desa

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berbentuk numerik. Dalam hal ini data kuantitatif yang digunakan adalah hasil kuesioner yang akan diolah menggunakan program IBM SPSS 20 for Windows. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan atau obyek penelitian yaitu Perangkat Desa, BPD dan Masyarakat yang ada di 7 desa di Kecamatan Kapur IX.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada responden penelitian yang bersangkutan, yang merupakan sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data pada pada pengumpulan data untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, objektif dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis (Sugiyono, 2016: 137).

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain sudah

terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, metabelasi data berdasarkan variabel dari seuruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2016).

Analisis data juga dikatakan sebagai penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana untuk dibaca dan diinterpretasikan. Dengan menggunakan metode kuantitatif diharapkan mampu mendapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat tentang jawaban yang diberikan setiap responden. Dan data yang berbentuk angka tersebut dapat diolah menggunakan statistik deskriptif, Uji kualitas data, uji Asumsi klasik, uji asumsi regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan bantuan computer melalui program IBM SPSS 20 *for windows*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Penyebaran 127 kuesioner yang terdiri dari 17 responden dari desa koto lamo, 17 responden dari desa lubuak alai, 19 responden dari desa muaro paiti, 19 responden dari desa koto bangun, 16 responden dari desa durian tinggi, 22 responden dari desa sialang dan 17 responden dari desa galugua. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jumlah responden laki-laki lebih besar (87 Orang) dibandingkan dengan responden perempuan (40 orang). Dan dari data yang suda diperoleh bahwa aparatur yang tamatan SMA/SMK sejumlah 69 Orang, tamatan D3 sejumlah 8 orang, tamatan S1

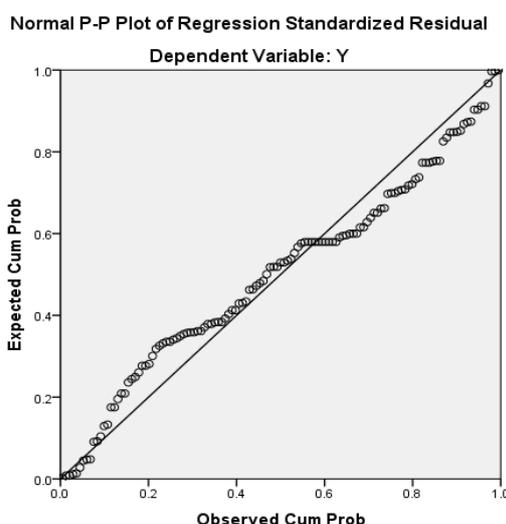
sejumlah 48 orang, dan tamatan S2 sejumlah 2 orang,

Analisis Data Validitas dan Reabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. Dari hasil uji yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 20 hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semua indicator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang diuji telah valid. Pengambilan kesimpulan bahwa variabel-variabel yang telah diuji telah valid didapat dari hasil nilai t hitung $>$ t tabel, yang mana untuk nilai t hitungnya 0,1743. Sedangkan uji realinilitas dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indicator dari variabel atau konstruk. Diperoleh hasil bahwa nilai Cronbach's Alpha $>$ 0,60, sehingga data bis dikatakan reliable atau handal.

Uji Asumsi Klasik

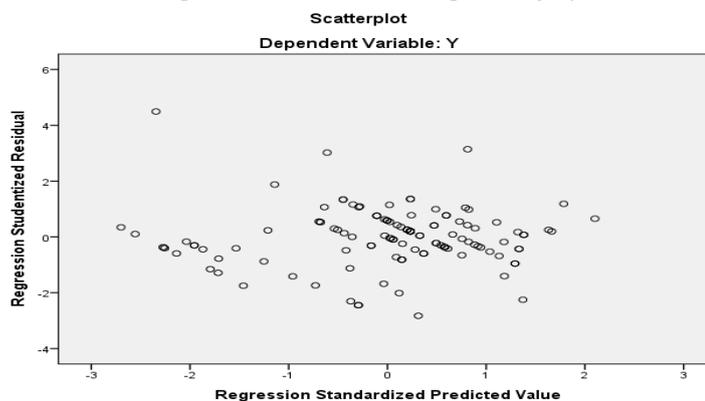
Sebelum melakukan uji regresi linear berganda, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikoleniaritas dan uji heterokedastisitas. Pada tahapan pertama dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Dan ada bisa dikatakan normal apabila nilai *Asymp. Sig (2-Tailed)* sebesar 0.137 yang mana lebih tinggi dari 0.005. Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terjadi kolerasi dilihat dari nilai *tolerance* $>$ 0,10 dan nilai VIF $<$ 10. Gambar menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik telah mendekati atau hampir berhimpit dengan sumbu diagonal atau membentuk 45 derajat dengan garis mendatar. Untuk memperkuat hasil pengujian tersebut dipergunakan analisis grafik normal *Scatterplot*.



Gambar 1

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan memplotkan grafik antara SRESID dengan ZPRED

dimana gangguan heteroskedastisitas akan terlihat dengan adanya pola tertentu pada grafik.



Gambar 2

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa titik-titik pada *Scatterplot* menyebar di atas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, sehingga dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefisients		Standardized Coefisients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.101	1.370		2.263	.025
X1	.225	.087	.239	2.596	.011
X2	.281	.105	.244	2.687	.008
X3	.134	.053	.184	2.507	.013
X4	.244	.050	.311	4.906	.000

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,101 + 0,225X_1 + 0,281X_2 + 0,134X_3 + 0,244X_4$$

Berdasarkan tabel diatas diatas, akan dibahas uji hipotesis secara parsial (t) yang dapat dilihat dibawah ini:

1. Variabel kompetensi aparatur (X_1) memiliki nilai t hitung sebesar 2,596, dan nilai signifikan (Sig.) sebesar 0,011. Karena nilai t hitung 2,596 > t tabel 1,979 dan Sig. < 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya variabel kompetensi aparat (X_1) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Variabel partisipasi masyarakat (X_2) memiliki nilai t hitung sebesar 2,687, dan nilai signifikan (Sig.) sebesar 0,008. Karena nilai t hitung 2,687 > t tabel 1,979 dan Sig. < 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya variabel partisipasi masyarakat (X_2) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Variabel pengendalian internal (X_3) memiliki nilai t hitung sebesar 2,507, dan nilai signifikan (Sig.) sebesar 0,013. Karena nilai t hitung 2,507 > t tabel 1,979 dan Sig. < 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya variabel pengendalian internal (X_3) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Variabel komitmen organisasi (X_4) memiliki nilai t hitung sebesar 4,906, dan nilai signifikan (Sig.) sebesar 0,000. Karena nilai t hitung 4,906 > t tabel 1,979 dan Sig. < 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya variabel komitmen organisasi (X_4) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 4. Koefisien Determinan (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.854 ^a	.729	.720	1.73843

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai determinan (*Adjusted R Square*) adalah sebesar 0,720 yang mengandung arti 72% variasi besarnya akuntabilitas pengelola dana desa bisa dijelaskan oleh variasi kompetensi aparat, partisipasi masyarakat, pengendalian internal dan komitmen organisasi. Sedangkan sisanya 28% (100%-72%) lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel lain yang tidak diteliti. Karena nilai koefisien determinan (*Adjusted R Square*) sebesar 0,72 dan mendekati satu, dapat disimpulkan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan data yang diolah pada tabel diatas t-hitung > t-tabel atau $2.596 > 1,979$ dan signifikannya $0,011 < 0,05$. Maka hal ini berarti bahwa variabel kompetensi aparat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelola dana desa, kesimpulannya H_0 diterima. Kompetensi aparat untuk variabel sebesar 0,225 dan bertanda positif. Artinya setiap kenaikan kompetensi aparat satu satuan maka akan mengalami kenaikan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa yang ada di kecamatan kapur IX sebesar 0.225 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparat yang ada di desa kecamatan kapur IX sudah baik, hal ini ditunjukkan dengan hasil kinerja aparat desa dalam menyelesaikan tanggungjawab yang diberikan, dan dapat memberikan laporan keuangan secara maksimal serta transparan. Kompetensi aparat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan banyak faktor yang dapat memengaruhi kedua aspek tersebut, seperti kompetensi yang dimiliki oleh aparat pemerintahan akan memengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa (Aulia, 2018).

Dengan adanya kompetensi aparat yang memadai, diharapkan pengelolaan dana desa yang ada di kecamatan kapur IX yang terdiri dari 7 desa berjalan dengan baik dan dengan semestinya serta sesuai dengan tujuan organisasi. Selain itu diharapkan juga adanya peningkatan dalam pembangunan desa yang lebih baik dan maksimal demi kemajuan dan kemakmuran desa. Penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship*, yang mana teori ini menggambarkan situasi para manajer yang tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik maka di tuntutan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat. sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, pemerintah daerah memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap masyarakat.

Dengan Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan). Untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut, dibutuhkan kompetensi aparat pengelolaan dana desa yang memadai. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atingingsih dan Ningtyas (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi aparat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah Aulia, Putri (2018) dan tarjo (2019) yang menyatakan bahwa semakin berkompeten aparat pengelola dana desanya maka pengelolaan dana desa akan semakin baik. Maka variabel kompetensi apataur dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan data yang diolah pada tabel diatas t-hitung > t-tabel atau $2.587 > 1,979$ dan signifikannya $0,008 < 0,05$. Maka hal ini berarti bahwa variabel Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa,

kesimpulannya H_0 diterima. Partisipasi masyarakat untuk variabel sebesar 0,281 dan bertanda positif. Artinya setiap kenaikan partisipasi masyarakat satu satuan maka akan mengalami kenaikan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa yang ada di kecamatan kapur IX sebesar 0.281 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Berdasarkan jawaban responden dapat disimpulkan bahwa masyarakat terlibat dalam kegiatan dan pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan dana desa pemerintah harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif baik dalam perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban. Dengan adanya partisipasi masyarakat akan mendorong seseorang untuk ikut berkontribusi seperti memberikan saran terhadap berbagai perencanaan dan pelaksanaan terhadap target yang ingin dicapai oleh organisasi, dengan begitu pencapaian target dan tujuan organisasi akan terjalankan dengan baik dan maksimal. Penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship*, dimana teori ini ditujukan untuk hasil utama dalam organisasi dan untuk kepentingan publik.

Dengan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, relevan dan dapat dipercaya oleh pemerintah desa maka akan menimbulkan responsiveness dan keinginan oleh masyarakat untuk terlibat dalam pemerintahan desa. Dengan begitu masyarakat bisa memberikan tanggapan atau masukan dalam meningkatkan pembangunan dan pengambilan keputusan untuk kedepannya. Laporan keuangan yang akuntabel dan transparan dapat terwujud dengan adanya kontrol baik sehingga menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atingsih dan Ningtyas (2019) yang menyatakan bahwa dengan adanya respon positif serta partisipasi masyarakat besar maka pengelolaan dana desanya akan semakin bagus pula. Penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah Sarah, dkk. (2020) yang menyatakan bahwa pemerintah harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas atau kegiatan desa. Penelitian masruhin, Anam dan Kaukab, M. Elfan (2019) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Karena semakin tinggi partisipasi, maka semakin tinggi jumlah individu

yang ikut terlibat di dalamnya. Semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan. Maka variabel partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan data yang diolah pada tabel diatas $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ atau $2,507 > 1,979$ dan signifikannya $0,013 < 0,05$. Maka hal ini berarti bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, kesimpulannya H_0 diterima. Pengendalian internal untuk variabel sebesar 0,134 dan bertanda positif. Artinya setiap kenaikan pengendalian internal satu satuan maka akan mengalami kenaikan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa yang ada di kecamatan kapur IX sebesar 0,134 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Berdasarkan jawaban responden dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal di desa yang ada di kecamatan kapur IX sudah berjalan dengan baik. Pengendalian internal merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya pengendalian internal yang baik semua pencapaian organisasi akan tercapai dengan maksimal.

Sistem pengendalian internal yang memadai bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan, selain itu sistem pengendalian internal bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap penyusunan, hukum dan peraturan dalam pembuatan laporan keuangan sehingga laporan yang akan dihasilkan lebih akuntabel (Sarah *et al.*, 2020). Dengan adanya pengendalian internal dengan baik diharapkan kinerja dan pengelolaan dana desa di desa yang ada di kecamatan kapur IX bisa lebih baik serta bisa menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparansi. Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan yaitu teori *stewardship* dimana dalam teori ini pengambilan keputusan harus berdasarkan kepentingan organisasi, maka dengan hal itu harus adanya pengendalian yang baik untuk pengambilan keputusan, serta dalam menghasilkan laporan keuangan yang bersifat efisien, andal dan dapat dipercaya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Atingsih dan Ningtyas (2019) yang

menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelola dana desa. Semakin besar pengendalian internal yang dilakukan maka akuntabilitas pengelola dana desa juga akan semakin bagus. Penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sarah, dkk (2020) yang menyatakan sistem pengendalian internal juga merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal yang memadai akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan, selain itu sistem pengendalian internal bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap penyusunan, hukum dan peraturan dalam pembuatan laporan keuangan sehingga laporan yang akan dihasilkan lebih akurat. Maka untuk variabel pengendalian internal dalam penelitian ini secara signifikan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan data yang diolah pada tabel diatas $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ atau $4,906 > 1,979$ dan signifikannya $0,000 < 0,05$. Maka hal ini berarti bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, kesimpulannya H_0 diterima. Komitmen organisasi untuk variabel sebesar 0,244 dan bertanda positif. Artinya setiap kenaikan pengendalian internal satu satuan maka akan mengalami kenaikan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa yang ada di kecamatan kapur IX sebesar 0,244 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa setiap aparatur memiliki komitmen organisasi yang tinggi. Komitmen organisasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana dengan adanya komitmen organisasi yang tinggi dari setiap individu yang ada dipemerintahan desa dengan begitu rasa tanggungjawabnya terhadap tugas yang diberikan akan semakin tinggi, dan juga akan menghasilkan kinerja yang bagus.

Komitmen organisasi merupakan hal yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh setiap aparatur desa, harus yakin dan ada rasa memiliki organisasi sehingga akan melakukan yang terbaik untuk organisasi tersebut (Tarjo, 2019). Dengan adanya komitmen organisasi yang dimiliki oleh setiap aparatur maka diharapkan kinerja setiap aparatur

akan lebih baik lagi dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship*, dimana teori ini mengemukakan penggambaran lebih mementingkan kepentingan organisasi dari pada kepentingan pribadi, dengan hal itu setiap aparatur harus memiliki rasa keterikatan dengan organisasinya tempat dia berada, dimana aparatur pengelola dana desa harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tarjo (2019) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelola dana desa. Artinya sumber daya manusia yang memiliki komitmen organisasi dalam melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin untuk kepentingan organisasi bukan kepentingan individu. Penelitian Sarah, dkk (2020) juga menyatakan komitmen organisasi yang tinggi akan bertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukannya dalam organisasi untuk mewujudkan pelayanan kepada publik agar menjadi lebih baik. Dan untuk variabel komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Adanya pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ada di kecamatan Kapur IX. Artinya dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa memang harus memiliki kompetensi yang cukup dan memadai.
2. Adanya pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ada di kecamatan Kapur IX. Artinya dalam pengelolaan dana desa masyarakat harus terlibat didalamnya.
3. Adanya pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ada di kecamatan Kapur IX. Artinya dalam pengelolaan dana desa harus adanya pengendalian yang dilakukan sehingga pengelolaan lebih terarah dengan baik.
4. Adanya pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ada di kecamatan Kapur IX. Artinya dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan komitmen organisasi dari setiap aparatur yang ada agar pengelolaan dana desa lebih maksimal.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu:

1. Peneliti hanya mengambil data atau pendapat kepada pihak pemerintah desa yang ada di kecamatan kapur IX saja.
2. Pada saat penyebaran kuesioner peneliti hanya mengantarkan kuesioner kepada pihak pemerintah desa saja tanpa mendampingi responden pada saat pengisian kuesioner.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian ini, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya juga melakukan pengambilan data atau pendapat kepada masyarakat seperti mewawancarai beberapa masyarakat untuk mengonfirmasi apakah pengelolaan dana desa memang sudah berjalan dengan baik oleh pihak pemerintahan desa.
2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya peneliti bisa mendampingi pengisian kuesioner secara langsung, apakah kuesioner benar-benar diisi dengan baik atau hanya sekedar asal-asalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton, F. X. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah INFORMATIKA*, 1(2).
- Atiningsih, S. & Ningtyas, A.C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali), *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), hal. 2015–2019.
- Aulia, P. (2018). Pengaruh kompetensi aparat pengelolaan dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten 50 Kota, *Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, Tenth Edition Paul*, 53(9), hal. 1689–1699.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), hal. 1269–1298.
- Mada, S., Kalangi, L. & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo, hal. 106–115.
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B. & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1). Doi: 10.35800/jjs.v8i1.15334.
- Masruhin, A. & Kaukab, M.E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1 (1)
- Raharjo, E. (2007). Agency Theory Vs Stewardship Theory in the Accounting Perspective. dosen STIE Pelita Nusantara Semarang.
- Rudana, Y. 2005. Pengaruh Kompetensi Aparatur PEMDA dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ekonomi*. Universitas Diponegoro.
- Sarah, S., Taufik, T., & Safitri, D. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SPI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), hal. 330–342.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tarjo. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi pada Desa Muara Niro Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo). *Jurnal Tata S*, 5(2).

Widyatama, A., Novita, L. & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2).

Yesinia, N.I., Yuliarti, C.N. & Puspitasari. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sistem Pengendalian Internal juga Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Aset (Akuntansi Aset)*, 10(1), hal. 105–11

<http://bebas.compas.id/2020>

www.djpk.kemenkau.go.id